

Perang Dua Srikandi Dalam Pilwali

Angga Sukmara C¹

Abstrak

Artikel ini mengangkat pertarungan dua pasangan calon walikota Malang. Kehadiran dua pasangan calon ini layak dipresiasi karena ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi. Tidak hanya itu, hal ini juga menandai kebangkitan kaum perempuan dalam politik lokal di Kota Malang. Dalam menelaah kehadiran kaum perempuan ini, maka digunakan pendekatan feminisme sebagai pisau analisis. Dengan pendekatan ini, kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik bisa diungkap dengan jelas.

Kata Kunci: *feminisme; pilkad; politik perempuan*

Abstract

This article raises the battle of two pairs of candidates for mayor of Malang. The presence of these two candidate pairs deserves to be appreciated for taking part in the democratic parties. Not only that, it also marks the resurrection of women in local politics in Malang City. In examining the presence of the women, the article uses the feminism approach as a knife of analysis. With this approach, women's presence in politics can be clearly expressed.

Keywords: *feminism; concurrent local electio; women politics*

¹ **Korespondensi:**

Mahasiswa Pasca Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok

Pendahuluan

Bulan Mei di tahun 2013 adalah bulan yang paling panas di Kota Malang. Bukan karena suhu dan panas matahari, melainkan karena suatu hal lain yang tidak ada hubungannya dengan alam yang membuat Kota Malang memanas. Pada bulan tersebut bumi “Arema (Arek Malang)” sedang mengalami pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih walikota dan wakil walikotanya. Dari berbagai Calon Walikota Malang ternyata ada juga yang membawa ikon Malang dengan embel-embel Aremanya. Tapi ada yang lebih menarik daripada itu adalah munculnya dua sosok perempuan dalam perang pilkada tersebut.

Dua sosok ini begitu dikenal dikalangan masyarakat Malang. Heri Pudji Utami atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bu Peni atau Bunda Heri dalam kampanyenya ini merupakan istri dari Walikota Malang yang sekarang yaitu Peni Suparto. Kemudian lawan srikandinya yang juga salah satu kandidat lawan terberat sang bunda adalah Sri Rahayu. Sri Rahayu merupakan anggota DPR RI komisi IX yang lebih dikenal kalangan masyarakat Malang dengan sapaan Mbak Yayuk atau SR. SR merupakan istri dari ketua DPD PDI Perjuangan Jatim.

Munculnya dua nama perempuan dalam pilkada atau pilkada Malang ini sangatlah menarik. Hal ini dikarenakan kejadian semacam ini jarang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Kemunculan sosok perempuan dalam pilkada-pilkada di daerah biasanya hanya satu sosok saja yang muncul untuk bertarung merebutkan kursi walikota, malahan bisa dikata kebanyakan pilkada kemunculan perempuan hampir tidak ada. Dua sosok perempuan kuat yang begitu dikenal kalangan masyarakat Malang ini begitu menyita perhatian disaat pertarungan di bulan Mei semakin dekat.

Pilkada Malang pada hari H-nya akan menjadi penentu apakah dari perang dua srikandi tersebut salah satu srikandi akan memenangkannya. Atau bahkan keduanya sama-sama tersingkir dan seteru Adam (lelaki) yang merupakan kandidat lainnya mampu memenangkan pilkada. Siapapun yang menang tetaplah pertempuran dua srikandi malang ini tidak dapat dilewatkan, mengingat *background* keduanya yang sama-sama kuat.

Dorongan Feminisme dan Behavioralisme

Kemunculan dua kandidat cawali (calon wali kota) Malang dalam pilkada Kota Malang secara teoritis sangat dipengaruhi oleh dua hal. Dua hal tersebut adalah faktor feminis dan behavioral. Feminis sebagai pendorong dua perempuan ini maju sebagai

leader kota Malang nantinya telah membuat pandangan keduanya masuk dalam tataran feminisme. Selanjutnya behavioral sebagai pendorong juga yang mengakibatkan kedua srikandi atau perempuan tersebut maju sebagai leader atau eksekutif kota Malang telah jelas dapat diartikan bahwa behaviorisme di kedua kubu begitu kental.

❖ Pendekatan Feminisme

Feminisme sebagai paham tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. “Feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanya tindakan sadar akan laki laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki” (Sa’idah dan Khotimah, 2003:34).

Kesetaraan dan persamaan yang diimpikan kaum perempuan agar minimal sebanding dengan kaum laki-laki inilah yang memunculkan feminisme tersebut. Mengutip perkataan Kemal Ataturk salah satu tokoh revolusioner bangsa turki yang menyebutkan pemunculan feminisme sendiri berdasarkan karena; “*diantara soal-soal perdjooangan jang harus diperhatikan, soal wanita hampir selalu dilupakan*” (Soekarn, 1963).

Berdasar alasan itulah bisa jadi perempuan terdongkrak hatinya untuk berjuang merebut kemerdekaannya. Mungkin karena itu pula lah dua perempuan di Kota Malang hadir sebagai kandidat terkuat sebagai Walikota Malang. Pada dasarnya “**Feminisme** (tokohnya disebut **Feminis**) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria” (Wikipedia, Diakses 28 Maret 2012). *Rather than maintaint the feminism offers a conherent account or meta-theory of its own, then, it is more appropriately viewed as a kind of developing dialogue around a common but evolving agenda* (Marsh dan Stoker, 2002:45). Jadi dengan muncul dan hadirnya dua srikandi di pemilukada Kota Malang adalah sebagai bentuk luapan feminisme kedua perempuan tersebut.

❖ Pendekatan Behaviorisme

Behaviorisme atau yang lebih dikenal dengan pendekatan tingkah laku atau perilaku (behavioural approach) merupakan sebuah reaksi terhadap spekulasi teori yang memberikan uraian penjelasan, kesimpulan dan penilaian berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan dan standar-standar kekuasaan maupun etno sentrisme, formalisme dan deskripsi barat yang menjadi karakteristik pendekatan tradisional kontemporer.

Memang terkadang agak sulit merepresentasikan seseorang itu behavioralis atau bukan, mungkin dengan melihat dari kondisi-kondisi seseorang dengan penganalisisan yang dirasa bersifat sempit dalam melakukan analisa deskriptif menyangkut institusi-institusi. Kondisi berikutnya menyerukan suatu pendekatan empiris yang sistematis, termasuk perluasan skema-skema yang bersifat klasifikasi, konseptualisasi pada beragam tingkat abstraksi, penyusunan hipotesis dan pengujian hipotesis melalui data empiris (Mariana, 2007:12).

The Behavioral approach to social and political analysis concentratis on a single, deceptively simple, question: why do people behave in the way they do? What differentiates behaviorist from other social scientist is their insistence that: (a) observable behavior. Whether it is at the level the individual or the social aggregate, should be the focus of analysis; and (b) any explanation of that behavior should be susceptible to empirical testing (Marsh dan Stoker, 2002:109).

Perhatian utama paham tingkah-laku terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dengan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa - peristiwa politik. Kategori-kategori itu biasanya dianggap sebagai ideologi, atau sistem kepercayaan yang menciptakan pola-pola tingkah-laku yang penuh makna (Website Shvoong, Diakses 20 Maret 2013).

Sejatinya kepercayaan diri berdasar pengalaman lah yang kental dalam kedua kubu srikandi tersebut sehingga behaviorisme itu muncul. Ini dikarenakan paham ini memandang kebenaran sebagaimana tersusun dan teruji dalam pengalaman. Bisa dikatakan hadirnya kedua kandidat perempuan ini merupakan salah satu bentuk munculnya kaum-kaum behavioralis perempuan dalam kandidat Calon Walikota Malang. Kaum behavioralis berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kegiatan politik. Upaya mereka mengenali kebutuhan dan bagaimana memenuhi kebutuhan itu dengan usaha memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Nasiwan, 2010:33).

Biografi Dua Srikandi

Perempuan-perempuan tangguh ini memiliki jati diri yang didukung oleh latar belakang yang sama-sama kuat. Selain pengaruh suami-suaminya, faktor lain yang mempengaruhi adalah tempat dimana masing-masing Srikandi ini menapaki karirnya. Masing-masing memiliki kekuatan dan basis massanya. Masing-masing juga punya

caranya sendiri untuk menggaet simpatik masyarakat dan masing-masing srikandi ini juga memiliki langkah dan gerakannya. Biar lebih jelasnya maka lebih baik mengenali mereka dengan mengetahui siapa sebenarnya srikandi-srikandi Malang ini.

❖ **Sri Rahayu**

Dra. Hj. Sri Rahayu atau yang lebih dikenal dengan nama Sri Rahayu atau Mbak Yayuk ini adalah mantan Ketua DPRD Kota Malang periode 1999-2001 yang saat ini menjadi anggota DPR RI Komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, dan Kesehatan. Di komisi IX DPR RI Sri Rahayu menjadi perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan. Karir politik yang dijejaki dari daerah hingga pusat ini rupanya membuat Sri Rahayu sudah sangat teruji dalam dunia perpolitikan nasional. Selain karir politiknya yang baik, Sri Rahayu juga merupakan istri dari Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Sirmadji.

Srikandi yang memiliki nomor anggota A-382 dalam komisi IX DPR RI ini juga menjabat sebagai wakil bendahara Fraksi PDI Perjuangan. Beliau menjadi DPR RI terpilih dari Dapil (Daerah Pemilihan) V Jawa Timur yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Srikandi yang terlahir di Nganjuk pada 3 Desember 1960 ini maju menjadi Wali Kota Malang berdasarkan rekomendasi yang keluar dari DPP PDI Perjuangan. Jati diri yang merupakan latar belakang Srikandi yang memiliki 3 orang anak ini rupanya menjadi modal utamanya untuk maju menjadi Calon Walikota Malang terutamanya berdasarkan pengalamannya.

❖ **Heri Pudji Utami**

Srikandi yang sudah sangat dikenal dikalangan ibu rumah tangga di Kota Malang ini memulai ancang-ancangnya sekitar 2 tahunan untuk maju sebagai Calon Walikota Malang. Berbagai permasalahan keluarga cukup tegar beliau hadapi yang dibuktikan dengan bertahannya keluarganya. Srikandi yang menjabat sebagai ketua PKK Kota Malang selama suami menjabat sebagai Walikota Malang ini sangatlah intens dalam berkampanye yang terbukti dari banyaknya gambar dan foto-fotonya diberbagai tempat.

Selain menjabat sebagai ketua PKK Kota Malang, Srikandi satu ini juga menjabat sebagai bendara DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Intensifitas kedua jabatannya ini rupanya lebih condong kepada ketua PKK Kota Malang, ini terbukti dengan berbagai aktivitasnya sebagai ketua PKK Kota Malang beberapa tahun belakangan ini. Hadirnya Srikandi ini sebagai Calon Walikota Malang sudah dapat dipastikan sejak lama dikarenakan beberapa fotonya terpanjang besar di baliho-baliho di jalan-jalan raya yang

banyak dilalui kendaraan, seperti jalan raya Suhat (Soekarno-Hatta). Modal sebagai ketua PKK dan bendahara partai ini rupanya menjadi modal utama bagi beliau untuk maju sebagai calon Walikota Malang periode 2013-2018.

Awal Api Peperangan

Pepatah kuno mengatakan tak akan ada asap bila tak ada api, yang artinya tak akan ada akibat bila tak ada sebab. Hal ini diibaratkan dalam artiannya sama dengan pertempuran dua srikandi Calon Walikota Malang. Perseteruan keduanya hingga berujung pada peperangan dalam pemilukada Kota Malang sangat menyita perhatian khalayak ramai Kota Malang. Gambar-gambar dan foto keduanya yang lebih banyak dibanding calon wali kota lainnya diberbagai tempat-tempat umum, baliho di jalananan, maupun diangkutan-angkutan umum ini telah menunjukkan bahwa atmosfir panas diantara keduanya sudah sangat mencolok.

Awal peperangan ini dikarenakan Peni Suparto selaku ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Walikota Malang berniat memajukan istrinya Heri Pudji Utami sebagai Walikota Malang periode selanjutnya. Disiapkannya Heri Pudji Utami sebagai Walikota Malang selanjutnya sudah sangatlah kentara. Hal ini rupanya belum cukup untuk memajukan Heri Pudji Utami.

Namun ada satu hal yang mengganjal Srikandi Heri maju sebagai Calon Walikota Malang karena rekomendasi dari PDI Perjuangan tak kunjung-kunjung keluar. Hasil rekomendasi yang dikeluarkan DPP PDI Perjuangan ternyata jatuh kepada Sri Rahayu dan membuat api peperangan diantara keduanya memanas. “Peni pun tegas mengklaim jika seluruh pengurus partai dengan simbol banteng gemuk bermoncong putih itu untuk mendukung istrinya. “Mulai anak cabang hingga tingkat ranting hanya mendukung satu calon. Calon dari PDIP hanya satu, yaitu bunda (sebutan Heri Pudji Utami-red). Masyarakat Kota Malang, harus teguh dengan satu pilihan, yakni Bunda,” kata Peni usai mendampingi istrinya mengembalikan formulir di kantor DPC PDIP, Sabtu (26/5)” (Surabaya Post, Diakses 31 Maret 2013).

Atmosfir peperangan kian memanas ketika “Peni yang juga Ketua DPC PDIP Kota Malang ini menyatakan, istrinya adalah orang yang tepat untuk dipilih. Pertimbangannya, karena tidak pernah tersangkut kasus hukum seperti dugaan kasus korupsi” (Surabaya Post, Diakses 31 Maret 2013). Hal ini merujuk pada Sri Rahayu yang pernah diisukan ketika beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang periode 1999/2004

(Wawancara, 8/3/2013). Isu-isu politik awal inilah yang kian memanaskan seteru diantara Srikandi tersebut.

Turunnya rekomendasi DPP PDI Perjuangan kepada Sri Rahayu membuat Heri Pudji Utami harus mencari partai lain untuk mendukungnya maju dalam Pemilukada. Permasalahan pelik ini yang mungkin membuat kubu Peni Suparto agak kelabakan. Hal ini semakin memanas ketika Peni bersama sang istri Heri dating keacara Partai Demokrat dengan menggunakan atribut atau pakaian Partai Demokrat yang membuat PDI Perjuangan geram (Wawancara, 8/3/2013). Hal-hal semacam inilah yang membuat api peperangan kian memanas didalam kubu PDI Perjuangan Kota Malang sendiri.

Ada satu hal lagi yang memanti api peperangan kedua Srikandi ini membawara dengan tidak didaftarkannya Sri Rahayu sebagai Calon Walikota Malang kepada KPU oleh Peni Suparto selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Berbagai alasan yang merupakan isu banyak dikeluarkan Peni untuk menguatkan Heri sebagai Calon Walikota Malang yang pantas direkom oleh PDI Perjuangan. Salah satu argument yang Peni keluarkan adalah; “Selama saya dua periode memimpin Kota Malang, tidak pernah melakukan korupsi. Bunda juga orang yang bersih dan pantas didukung,” ujar Peni (Surabaya Post, Diakses 31 Maret 2013).

Lahirnya berbagai isu serangan ini juga banyak menjadi perbincangan atau obrolan masyarakat. Rentetan kelakuan yang dilakukan Peni membuatnya dia didepak dari PDI Perjuangan. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jatim Kusnadi mengatakan tindakan indisipliner Peni Suparto dan Wijianto terutama karena menolak mendaftarkan calon walikota (Cawali) dan calon wakil walikota (Cawawali) dari PDIP yang direkomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) (Bisnis Jatim, 2013). Peni pun harus memutar otaknya untuk bagaimana caranya agar Heri dapat maju dengan backingan atau dukungan yang kuat selain dari kubunya.

Keluarnya rekom/rekomendasi PDI Perjuangan kepada Sri Rahayu membuat Heri Pudji Utami akhirnya menyebrang kepartai lain. Rekom PDI Perjuangan yang keluar dengan rujukan pasangan Sri Rahayu dan Priyatmoko Utomo rupanya menutup jalan Heri untuk maju sebagai eksekutif Kota Malang melalui PDI Perjuangan. Heri pun akhirnya berpasangan dengan Sofyan Edi dari Partai Golkar sebagai pasan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Malang. Heri pun mengklaim telah didukung oleh 20 partai.

Perang Dua Srikandi Kota Malang

Keluarnya rekom PDI Perjuangan yang merekom pasangan Sri Rahayu dan Priyatmoko Utomo secara jelas dan gamblang bahwa PDI Perjuangan maju dengan kepala tunggal tanpa koalisi dengan partai manapun. Ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan masih sangat percaya diri bahwa dominasinya di Kota Malang masih sangat kuat. Rasa percaya diri ini merupakan suatu hal yang benar atautkah merupakan pengetesan apakah PDI Perjuangan masih sangat kuat di Kota Malang merupakan salah satu perbincangan yang banyak diobrolkan warga Malang saat ini.

Ini merupakan hal yang wajar mengingat selama dua periode PDI Perjuangan dengan sosok Peni Suparto sebagai Walikota Malang dalam pemilihan kepala daerah Kota Malang selalu menang telak. Bisa dikatakan tanpa koalisi pada waktu itu PDI Perjuangan menang telak dan saat ini ceritanya berbeda karena Sang Raja PDI Perjuangan Kota Malang tersebut sudah dipecat. PDI Perjuangan rupanya harus ekstra keras untuk memenangkan Pemilu karena keluarnya Peni berarti berkurangnya kekuatan partai. Tapi hal itu rupanya tidak begitu berarti mengingat PDI Perjuangan merupakan salah satu partai kader yang terkenal solid dan militan.

Rezim PDI Perjuangan di Kota Malang rupanya membuat PDI Perjuangan pada Pemilu kali ini tetap berani berdiri tegak sendiri tanpa berkoalisi. Majunya Sri Rahayu dan Priatmoko Utomo sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berasal dalam satu payung ini membuat PDI Perjuangan merupakan satu-satunya lagi partai di Pemilu Kota Malang yang berdiri sendiri tanpa koalisi.

Genderang peperangan semakin jelas terlihat ketika sang Bunda HP atau Heri Pudji berpasangan dengan Sofyan Edi yang merupakan ketua DPD Partai Golkar Kota Malang. Selain itu sang bunda juga didukung oleh PAN (Partai Amanat Nasional). Masih ada lagi, 2 partai besar itu rupanya belum cukup untuk mendukung bunda, pihak Bunda HP mengklaim bahwa calonnya maju didukung belasan partai partai kecil. Hal ini membuat pertseteraan antara Srikandi semakin seru dikarenakan kekuatan diantara keduanya masing-masing sedang dibangun dan kekuatan keduanya pun semakin diperhitungkan.

Perbedaan masa pemilu di masa Peni semasi di PDI Perjuangan dan semasanya tidak lagi di PDI Perjuangan memang banyak yang harus dibenahi oleh PDI Perjuangan. Biar pun lawan koalisi partai-partai besar apalagi lawan koalisi partai-partai kecil PDI Perjuangan tidak akan goyah dan pasti menang dalam peperangan pemilu karena semua kader yang ada di PDI Perjuangan adalah kader yang solid dan militant (Wawancara,

8/3/2013). Memang tidak dipungkiri masih ada beberapa anak ranting yang belum pulang kerumah karena hasutan Peni tapi dalam waktu dekat mereka pasti akan pulang kerumahnya (kembali lagi kearah tujuan PDI Perjuangan) (Wawancara, 8/3/2013).

Dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) PDI Perjuangan Kota Malang yang dipimpin Sri Untari. Saat nama bunda HP disebut, seluruh ruangan langsung menyahut, "huuuu.....!" Bahkan ada yang berteriak, "jangan sebut nama pengkhianat!" dari Rakercabsus PDI Perjuangan Kota Malang ini dapat dilihat bahwa angin peperangan tinggal meletus saja diantara dua kubu Srikandi (Wawancara, 8/3/2013).

Suasana pada saat Rakercabsus itu sempat gaduh ketika Sri Untari atau yang sering dipanggil Sri ini menyebut nama Bunda Heri Pudji dalam acara tersebut. "Sri yang memberi sambutan berhenti sejenak. Untuk meredakan suasana, Sri mengatakan calon PDIP yang akan merebut kemenangan" (Tribun News Surabaya, 2013). Mendengar perkataan nama sang Srikandi yang membelot rupanya membuat kuping para kader PDI Perjuangan memanas.

Setelah keluarnya rekom PDI Perjuangan kepada pasangan Sri Rahayu dan Priatmoko Utomo atau yang lebih dikenal dengan SR-MK ini masih tidak boleh diremehkan. Sosok SR dikalangan masyarakat kota Malang sangatlah dikenal mengingat beliau dulu berkiprah sebagai DPRD Kota Malang, dan hal ini yang menjadi suatu kekuatan bagi pasangan calon ini (Wawancara, 10/3/2013). Bisa dikatakan kalau saat ini SR telah menjadi Ratu PDI Perjuangan Kota Malang. Srikandi lulusan IKIP Negeri Malang (sekarang Universitas Negeri Malang) pada 1983 ini harus berhadapan dengan sang Ratu yang didukung oleh 20 partai.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Bunda HP dan Sofyan Edi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dadi ini merupakan lawan tangguh dari sang Ratu PDI Perjuangan. Hal ini mengingat pengaruh Peni Suparto selama menjabat ketua DPC PDIP Kota Malang tidak begitu saja hilang. Terbukti dengan beberapa PAC PDIP Kota Malang yang masih setia dengannya mendukung Bunda HP untuk menjadi Walikota Malang. Kader-kader PDI-P yang setia terhadap Peni menamakan dirinya dengan *Red Army* (Wawancara, 14/5/ 2013).

Ada satu hal lagi yang tidak kalah panas. Permasalahan dalam Rakercabsus saja sudah membuktikan seberapa panasnya peperangan Srikandi ini. "Selain itu, ARB di Malang juga melakukan temu kader dan partai sahabat. Pada kesempatan itu dijadikan momen untuk melakukan kebulatan tekad mendukung Calon Walikota (Cawali) dan Calon

Wakil Walikota (Cawawali) yang didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional serta Partai Hati Nurani Rakyat, yakni Heri Pudji Utami dan Sofyan Edi Jarwoko, yang juga Ketua DPD PG Kota Malang non-aktif' (Berita, Diakses 1 April 2013). Datangnya ARB di Malang jelas tidak main-main, apalagi pasangan Bunda HP dan Sofyan Edi ini dengan serius mengikat 20 partai tersebut sebagai Koalisi Malang Beratu (KMB) yang diantaranya adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Hanura, PPP, PBR, PKPI, PBB, PDP, PIS, Partai Merdeka, Partai Republikan, PKNU, PNU, Partai Buruh, Partai Kedaulatan, PPI, PPNUI, Partai Patriot, Partai Pelopor, dan PDP (Bapak Nande, 14 Mei 2013). Dari banyaknya koalisi ini jelas merupakan pesaing yang tangguh bagi Srikandi PDI-P dan Srikandi 20 partai ini benar-benar serius untuk memenangkan perebutan kursi Walikota Malang. Ini mengingat dari 17 partai kecil yang mendukung Srikandi Bunda HP, 3 diantaranya adalah partai-partai besar dalam tataran nasional.

Perseteteruan yang berawal dari api peperangan didalam kubu PDI Perjuangan ini telah mengerucut pada satu titik. Titik pereseteruan itu kini berada pada pertarungan antara SR sang Ratu PDI Perjuangan Kota Malang dan Bunda HP sang Ratu 20 Partai di Kota Malang. Kedua Srikandi ini memiliki kekuatan dengan basis-basis pemilih yang cukup besar di Kota Malang sehingga keduanya sangatlah menyita perhatian dalam Pemilukada Kota Malang periode 2013-2018. Majunya dua sosok ini telah membuktikan bahwa tingkat kemajuan perempuan Kota Malang sudah cukup tinggi. Karena *“sesungguhnya benarlah perkataan Charles Fourier kalau ia mengatakan, bahwa tinggi-rendahnja tingkat-kemajuan sesuatu masyarakat, adalah ditetapkan oleh tinggi-redahnya tingkat-kedudukan perempuan didalam masyarakat itu”* (Soekarno, 1963:17).

Perkataan Charles Fourier diatas merupakan tolak ukur sebagai taraf kemajuan perempuan Kota Malang terutama dalam segi politik. Kamajuan ini terbukti dengan munculnya sosok kedua Srikandi Kota Malang yang menjadi Ratu masing-masing kubunya. Genderang perang sudah dimulai, dan sosok Srikandi sudah mulai dikenal. Pertempuran dimasing-masing kubu sudah mulai terbuka. Pertempuran kedua kubu juga semakin memanas. Polemik yang terjadi dalam pemilukada Kota Malang sekarang juga menjadi kemajuan perempuan-perempuan Kota Malang.

SR-MK atau Dadi

Munculnya kepermukaan dua Srikandi Kota Malang kurang lebih dapat menggambarkan kondisi politik perempuan kota Malang. Srikandi-srikandi yang

bertempur dalam peperangan ini patut dijadikan sebagai contoh. Seperti sabda Nabi Muhammad S.A.W; *“Perempuan itu tiang negeri. Manakala baik perempuan, baiklah negeri. Manakala rusak perempuan, rusaklah negeri?”* (Soekarno, 1963:11)

Jadi dari kedua Srikandi ini para masyarakat akan memilih Srikandi yang terbaik dari yang baik. Dari pertempuran itu muncullah dua jargon yang dikenal dalam kedua kandidat Srikandi tersebut. Yang pertama adalah SR-MK merupakan jargon dari pasangan Sri Rahayu (SR) dan Priatmoko Utomo (MK). Lalu yang kedua adalah jargon Dadi yang merupakan jargon dari pasangan Bunda HP dan Sofyan Edi.

❖ **SR-MK**

SR-MK selain singkatan kedua nama pasang calon walikota dan wakil walikota dari PDI Perjuangan juga merupakan singkatan dari jargon unggulan kubu PDI Perjuangan dengan kepanjangan Suara Rakyat-Malang Kota. Jargon ini diambil karena SR-MK membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat Kota Malang yang ingin menyuarakan aspirasinya maupun menyampaikan aduannya kepasangan calon ini (Anak Agung, 8 Maret 2013). Kedua pasangan calon ini rupanya membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh kalangan masyarakat Kota Malang untuk menyampaikan unek-uneknya.

SR-MK atau Suara Rakyat Malang Kota ini selain menjadi jargon juga dibuktikan oleh Srikandi PDI Perjuangan ini. “Mbak Yayuk (SR) saat ini sangat sering blusukan kedaerah-daerah baik itu pelosok maupun dilingkup pusat Kota Malang selain untuk menghimpun suara juga untuk mendengar aspirasi masyarakat Kota Malang secara langsung. Kedua pasangan calon ini terutama Mbak Yayuk sangat intens menjemput bola dengan turun kelapangan karena bisa dikata sudah kalah Start dengan Bu Peni” (Wawancara, 8/3/2013).

Jargon SR-MK ini ternyata sudah cukup dikenal di masyarakat Kota Malang. Rupanya blusukan Srikandi PDI Perjuangan ini tidak sia-sia. Usaha memenagkan pertarungan pemilukada ini benar-benar serius ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. Seperti yang dikatakan Sri Untari waktu memimpin Rakercabsus, "Nanti kita rebut kemenangan. Tidak perlu dua putaran, langsung satu putaran," ujarnya dan disambut tepuk tangan seluruh yang hadir (Tribun News Surabaya, 2013). Ucapan Sri Untari ini rupanya benar-benar serius akan dibuktikan.

Srikandi yang kini menjadi Ratu PDI Perjuangan ini selain blusukan juga membuka posko dalam bentuk media sosial. Cara ini dilakukan untuk mengetahui unek-unek masyarakat yang belum tersampaikan ketika beliau blusukan. Posko dalam bentuk fisik

seperti menempatkan posko pada suatu tempat semisal rumah ataupun bangunan untuk posko, tidak semua orang sempat mendatanginya. Sehingga pembukaan posko lewat media sosial rupanya menjadi salah satu hal untuk mengoptimalkan tujuan Srikandi ini dalam menampung suara masyarakat Kota Malang. Keseriusan SR-MK benar-benar dilakukan sangat serius agar basis PDI Perjuangan di Kota Malang tetap bertahan.

❖ **Dadi**

Jargon Dadi dari pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Malang Bunda HP dan Sofyan Edi ini juga sudah cukup dikenal masyarakat Malang. Jargon Dadi memiliki arti lain selain singkatan dari nama kedua pasang calon tersebut. Arti lain dari jargon Dadi adalah Jadi. Ini diambil dari bahasa Jawa, kata Dadi merupakan kata dalam bahasa Jawa yang artinya adalah Jadi. Ini mungkin difilosofikan agar kedua pasang calon ini jadi Walikota Malang mengingat arti makna Dadi dalam jargonnya.

Srikandi dengan jargon Dadi ini juga tidak kalah getol untuk menggaet simpatik masyarakat. Sang Srikandi juga sering turun ke masyarakat terutama kepada kalangan ibu-ibu rumah tangga. Turunnya Bu Peni ke ibu-ibu rumah tangga dipermudah karena beliau merupakan ketua PKK Kota Malang sehingga mudah baginya untuk bertemu dan mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga sebagai suatu langkah untuk menggaet suara pada pemilu nanti (Wawancara, 8/3/2013). Salah satu langkah cerdas dari Srikandi ini dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada.

Tidak mau kalahnya pasangan Dadi untuk menggaet suara dalam pemilu Kota Malang dengan pasangan calon lainnya terutama dengan pasangan calon SR-MK. Langkah-langkah yang dilakukan Srikandi Dadi untuk memenangkan pemilu Kota Malang juga sangat serius. Ini dibuktikan dengan semangat para loyalis Srikandi Dadi yang memberikan sumbangan kepada pasangan Dadi. “Jumlah donasinya pun tergolong besar yakni Rp 24.260.500 dan langsung diterima oleh calon wakil walikota, Ir Sofyan Edi Jarwoko. Nampak iku mendampingi Bung Edi, antara lain Direktur Pemenangan DADI Yoestiadji dan beberapa anggota tim sukses DADI” (Ojok Lali, Diakses 1 April 2013). Semangat SR-MK dan semangat Dadi untuk memenangkan Pemilu Kota Malang sama-sama serius sehingga peperangan Srikandi ini sangat panas dan membara.

Pandangan Masyarakat

Munculnya kedua Srikandi ke permukaan politik dalam pemilu Kota Malang membuat mereka kini sangat terkenal di Kota Bumi Arema. Sama-sama kuat latarbelakang

masing-masing Srikandi membuat keduanya harus kerja ekstra keras untuk memenagkan kursi Walikota Malang. Para masyarakat Bumi Arema pun harus memilih salah satu Srikandinya yang muncul sebagai Calon Walikota Malang. Pada tanggal 23 Mei 2013 mendatang para Arema Kota Malang akan menjatuhkan pilihannya, dan kedua sosok Srikandi ini yang begitu menyita perhatian para masyarakat Kota Malang.

Menurut pedagang jajan keliling di Universitas Brawijaya, Bu Peni masihlah kuat mengingat dia istri Walikota Malang dua periode yang pasti persiapannya sudah lama dan matang, namun Sri Rahayu juga tidak bias diremehkan karena Iwan pemilik matos yang merupakan mafia di Kota Malang sudah kabarnya sudah beralih kepada Sri Rahayu dimana Iwan dulu adalah salah satu orang dibelakang kemenangan Peni selama dua periode (Wawancara, 14/3/2013). Penilaian masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat kecil ini pun sudah dapat menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Kota Malang sudah cukup maju dalam bidang politik.

Penilaian kedua sosok Srikandi ini tidak hanya masuk penilaian dan perhatian kalangan kecil saja. Para kalangan akademis khususnya mahasiswa yang sekarang dikenal apatis dan acuh tak acuh pada pemilu juga mensorot pandangannya kepada dua Srikandi bumi Arema ini. "Masyarakat Malang sudah pintar-pintar dan tidak lagi melihat calon ini didukung oleh siapa, melainkan melihat sosoknya bagaimana. Maksud dari melihat sosoknya itu seperti melihat kualitas dan kredibilitasnya bagaimana. Kalau Bu Peni terlihat lebih ambisius dan arogan bila dilihat melalui foto-fotonya dibanyak tempat seperti di pohon-pohon dan tiang listrik pun dipasang fotonya dan beliau pemberitaannya di Media dan televise local begitu sering. Kalau Bu Sri terlihat lebih kalem karena foto-foto beliau hanya terpusat diberbagai baliho-baliho dan baner-baner di jalan-jalan raya dan fotonya sebenarnya kalah banyak dibanding Bu Peni tapi kabarnya beliau sering blusukan ke kampung-kampung. Dan masyarakat pasti lebih pintar sekarang sehingga mereka pasti akan memilih atau enjatuhkan pilihannya dengan melihat sosoknya, mana sosok yang lebih berkualitas dan baik dalam memimpin Kota Malang" (Wawancara, 3/4/2013). Pernyataan itu keluar dari kalangan akademis, rupanya akademisi juga tersorot perhatiannya pada pemilukada Kota Malang. Jadi pemilukada kota Malang ini sangatlah begitu panas bahkan sangat membara.

Catatan Akhir

Kemunculan kedua Srikandi Bumi Arema dalam pemilkuda Kota Malang begitu menyita perhatian para masyarakat kota Malang. Kedua Srikandi ini merupakan representasi kemajuan perempuan Kota Malang dalam segi politik. SR yang memperoleh suara sekitar 73.612 suara pada pemilihan legislatif untuk DPR RI ini membuktikan bahwa begitu kuatnya sosok Srikandi PDI Perjuangan ini. Hal serupa juga tidak dapat diremehkannya Bunda HP yang telah melakukan persiapan lama untuk maju sebagai Walikota Malang.

Para loyalis masing-masing kubu patut diacungi jempol. Kesolidan dan militansi kader-kader PDI Perjuangan sudah tidak patut dipertanyakan lagi. Dan juga bukti loyalitas kubu Bunda HP juga tidak patut dipertanyakan. Salah satu kubu sudah melakukan serangan dengan menyebarkan isu politik kepada pesaingnya. Panasnya api dalam peperangan Srikandi ini kian membara melihat berbagai permasalahan-permasalahan yang dipaparkan. Sejatinya apa yang terjadi merupakan implikasi dari masalah polemik didalam kubu PDI Perjuangan.

Para masyarakat Malang sekarang pun sudah semakin pintar untuk memilih siapa pemimpinnya dalam pemilukada Kota Malang pada 23 Mei 2013. Pecahnya perang Srikandi yang membara memang membuat Kota Malang untuk sementara waktu masyarakatnya akan terkubu-kubukan, tidak hanya untuk kubu masing-masing Srikandi tapi juga terkubukan oleh pasacngan calon lainnya. Perhatian masyarakat kota Bumi Arema ini memang lebih kepada duel kedua Srikandi. Secara positif duel ini merupakan representasi kemajuan pemikiran politik perempuan Kota Malang. Perang Srikandi sudah terjadi, siapa yang akan menduduki kursi Walikota Malang antara dua Srikandi tersebut juga belum diketahui jadi hasil pemilukada nantilah yang akan menjawab Srikandi mana yang akan menang dari peperangan ini.

Pembatalan hasil pemilukada seperti yang dijelaskan dalam tabel di atas, diikuti dengan adanya perintah untuk melakukan perhitungan suara ulang jika terbukti ada pelanggaran Pemilukada yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif (STM). Bahkan MK dapat mendiskualifikasi salah satu pasangan calon seperti contohnya yang terjadi pada Pemilukada Kota Waringin Barat. Pendiskualifikasian ini dilakukan jika dalam persidangan terbukti pasangan tersebut dianggap tidak memiliki kompetensi baik dalam segi hukum maupun administratif untuk mengikuti Pemilukada. Misalnya saja pernah melakukan pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman yang mencapai 5 tahun

atau lebih. Contoh putusan ini dapat kita lihat pada kasus sengketa Pemilukada yang terjadi di Bengkulu Selatan dan Pemilukada Kota Tebing Tinggi.

Putusan MK atas dua penggolongan berdasarkan nilai bobot pelanggarannya, yakni *pertama* pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, *kedua* pelanggaran yang bersifat sporadis telah menjadikan MK sebagai lembaga tunggal yang mampu memutuskan perkara hasil Pemilukada. Dalam beberapa kasus MK juga memperlihatkan superioritasnya dalam kewenangan ini dengan langsung menetapkan kewenangan bagi salah satu pasangan calon jika dalam persidangan salah satu sangan calon lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat STM. Contoh ini dapat dilihat dalam perkara Pemilukada Kotawaringin Barat.

Berbagai keputusan yang dikeluarkan MK sebagai suatu putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kalangan masyarakat menganggap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK melenceng jauh dari apa yang telah digariskan dalam perundang-undangan, sehingga masyarakat dan praktisi menuntut agar kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Pemilukada ini untuk dikembalikan kepada MA. Sehingga polemik ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh MK.

Catatan Penutup

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 2008, perkembangan berdemokrasi ditingkat daerah tumbuh dengan luar biasa, seluruh kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat (Nugroho, 2011:4). Pemilihan kepala daerah secara langsung ini menimbulkan secercah harapan pada terlaksananya kehidupan pemerintahan daerah yang lebih baik. Namun, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ini juga melahirkan permasalahan baru. Beberapa daerah yang telah melaksanakan Pemilukada tidak puas dengan hasil Pemilukada dan berujung pada pengajuan keberatan atas hasil Pemilukada tersebut ke pengadilan dengan alasan yang beragam.

Beralihnya penyelesaian sengketa Pemilukada dari MA ke MK yang didasarkan atas berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum akan membawa harapan baru karena penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh MK relatif tidak menimbulkan konflik yang berarti. Namun, yang perlu dipikirkan adalah, apabila dalam kasus yang diputus ternyata terdapat bukti baru, apakah MK akan membuka

kembali kasus tersebut dengan mekanisme peninjauan kembali seperti yang dilakukan oleh MA. Karena sifat peradilan yang dilakukan oleh MK adalah keutusan terakhir dan final.

Banyaknya persoalan yang ditimbulkan akibat implementasi Pemilukada ini, adalah sebuah keniscayaan untuk diterbitkannya UU Mahkamah Konstitusi yang baru dan UU Pemilukada yang nantinya akan menjadi rujukan utama dan komprehensif penyelenggaraan Pemilukada di seluruh Indonesia (Narziah, Diakses tahun 2013). Dengan diterbitkannya UU baru tersebut diharapkan dapat mengantisipasi berbagai kendala Pemilukada lain yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifi, M. Mahrus, dkk. (2012). *Tafsir Konstitusi Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomer 1 Maret 2012. Mahkamah Konstitusi: Jakarta.
- Deliarnoor, Nandang Alamsyah. (2008). *Tinjauan Teoritis Yuridis Sengketa Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada)*. Makalah yang disampaikan pada saat Sosialisasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
- Kasim, Helmi dkk. (2012). *Kompabilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilu*. Jurnal Konstitusi Vol 9, No 4, Desember 2012. Mahkamah Konstitusi: Jakarta.
- Narziah, N. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*. Diakses melalui laman web <http://pshk.law.uui.ac.id>
- Nugroho, Ari Setio. (2011). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat)*. Universitas Andalas: Sumatera Barat.(skripsi dipublikasikan).
- Safarullah. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu: Studi Kasus Pemilu Konawe Utara*. UII: Yogyakarta.(Skripsi dipublikasikan)
- Sahdan, Greorius dan Muhtar Haboddin (ed). (2009). *Evaluasi Kritis Pelaksanaan Pilkada di Indonesia*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy.
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
<http://bahasa.cs.ui.ac.id>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah..
- Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004.
- UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Wawancara

- Wawancara, Anak Agung Made Surya Aditya Putra, 8 Maret 2013.

Wawancara, Iman Dwi Saputra, 10 Maret 2013. Iman Dwi Saputra sama juga seperti Anak Agung Made Surya Aditya Putra yang juga merupakan salah satu kader Baguna PDI-P. Para kader-kader Baguna banyak yang turun membantu Pemilkuada Kota Malang karena Sri Rahayu merupakan tokoh penting yang berasal dari Baguna.

Wawancara, Bapak Nande, 14 Mei 2013. Bapak Nande merupakan tim sukses yang paling berpengaruh dalam tim kampanye dan pemenangan pasangan dari Bunda Heri Pudji dan Sofyan Edi atau yang lebih dikenal dengan istilah Dadi.

Wawancara, Pedagang Jajan Keliling Universitas Brawijaya, 14 Maret 2013.

Wawancara, Mimin Anwartina, 3 April 2013.